

**STRATEGI PENANGANAN ANAK PUTUS SEKOLAH PADA SUKU BAJO MELALUI
OPTIMALISASI PERAN KOMITE SEKOLAH
DI KECAMATAN TIWORO KABUPATEN MUNA¹**

La Manguntara²

La Iba³

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk merumuskan dan melaksanakan model penanganan anak putus sekolah melalui optimalisasi peran (pemberdayaan) Komite Sekolah sehingga anak-anak putus sekolah di Kecamatan Tiworo Kabupaten Muna dapat kembali bersekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian diarahkan pada upaya mendeskripsikan dan menganalisis: a) jumlah anak putus sekolah serta faktor-faktor penyebabnya; b) persepsi orang tua dan anak putus sekolah terhadap arti penting pendidikan; c) usaha-usaha yang dilaksanakan oleh Komite Sekolah, Dinas kabupaten dan stakeholder lainnya dalam mengatasi problem anak. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*indepth interview*), dokumentasi (*documentation*), dan observasi (*observation*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyaknya anak putus sekolah disebabkan oleh dua faktor utama, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berhubungan dengan rendahnya minat dan motivasi anak untuk sekolah serta adanya persepsi yang keliru tentang arti pendidikan. Faktor eksternal berhubungan erat dengan masalah pekerjaan orang tua sebagai nelayan tradisional. Usaha yang dilakukan persepsi orang tua tentang pendidikan, faktor ekonomi serta pergaulan anak-anak setempat. Usaha-usaha yang dilakukan untuk menangani anak putus sekolah sejauh ini belum dilaksanakan secara serius dan terkoordinasi. Usaha yang dilakukan hanya sebatas apa yang dilakukan oleh orang tua dengan mendorong anaknya untuk kembali bersekolah (untuk sebagian kecil orang tua). Pemerintah melihat fenomena anak putus sekolah di wilayah ini hanya sebatas problem terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang tidak memadai sehingga solusinya antara lain dilakukan dengan membangun gedung SMP (sekarang dalam proses penyelesaian). Sementara faktor persepsi yang keliru dari para orang tua dan anak putus sekolah sebagai penyebab banyaknya anak putus sekolah nampaknya luput dari perhatian pemerintah.

Kata Kunci: strategi, anak putus sekolah, optimalisasi, komite sekolah

ABSTRACT

The objectives of this study are to formulate and to implement the handling model of school dropouts through optimization of the role (empowerment) of School Committee, so that the children dropped out from school in the Tiworo District of Muna Regency could back to school. This study used a qualitative approach. The focus of research is geared to describe and to analyze: a) the dropout rate and the contributing factors; b) the perception of parents and dropouts student on the importance of education; c) The efforts undertaken by the School Committee, Ministry of Education

¹Hasil Penelitian

²Dosen pada Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo, Kampus Hijau Bumi Tridharma, Jl. H.E Agus Salim Mokodompit, Kendari 93232, Pos-el : lamanguntara@yahoo.co.id

³Dosen pada Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Halu Oleo, Kampus Hijau Bumi Tridharma, Jl. H.E Agus Salim Mokodompit, Kendari 93232, Pos-el: iba_unh@gmail.com

in districts and other stakeholders to address the problem of child. The data was collected through in-depth interviews (depth interview), documentation (documentation), and observations (observation). The results showed that the numbers of school dropouts are caused by two main factors, namely internal factors and external factors. Internal factors related to the low interest and motivation of children for school as well as their erroneous perception of the meaning of education. External factors are closely related to the problem of parents' job as traditional fishermen. Efforts are being made to deal with dropouts so far not been seriously implemented and coordinated. The effort done was limited to what was done by the parents to encourage their children for returning to school (for a small number of parents). The government looks the phenomenon of school dropouts in this area as only a problem of lack of educational facilities that are inadequate, so the solution among others is by building the junior high school (now in the process of completion). While factors erroneous perception of parents and children dropping out of school as a cause of many school dropouts seems to escape the attention of the government.

Keywords: *strategy, school dropouts' children, optimization, school committee*

A. PENDAHULUAN

Kasus putus sekolah yang terjadi di hampir seluruh daerah di Indonesia sangat memprihatinkan. Meskipun konstitusi pemerintah sudah memberi jaminan kepada setiap warga negara untuk menegenyam pendidikan, namun fakta yang ada menunjukkan hal sebaliknya. Banyak anak usia sekolah yang sesungguhnya mereka wajib menegenyam pendidikan (umur 7-15 tahun) justru mengalami putus sekolah karena berbagai persoalan. Tidak dapat dibayangkan bagaimana kualitas sumber daya manusia di negeri ini bila keadaan tersebut dibiarkan secara terus-menerus. Dampak ke depan dari banyaknya anak putus sekolah adalah rendahnya sumber daya manusia Indonesia, karena anak-anak tersebut akan menjadi angkatan kerja yang tidak berpendidikan, sehingga hanya akan bekerja pada sektor-sektor pekerja kasar informal dan pembantu rumah tangga (Yuga, 2007). Selain itu, akan banyak anak yang hidup di jalanan. Dampaknya lanjutannya adalah Indonesia tidak dapat berkompetisi dengan negara lain di era globalisasi.

Menurut Muhammad, Peneliti Senior ILO (Organisasi Buruh Internasional), tahun 2005 terdapat 4,18 juta anak usia sekolah di Indonesia yang putus sekolah dan menjadi pekerja anak (Tempo Interak-

tif, 13 Juni 2005). Hasil penelitian terbaru, sebanyak 19 persen anak-anak di bawah 15 tahun tidak bersekolah dan lebih memilih untuk menjadi pekerja. Survei ini dilakukan pada 1.200 keluarga di lima provinsi, yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan.

Menurut data Balitbang Depdiknas tahun 2003 (Hartono, 2007) Jumlah anak putus sekolah dalam wajib belajar yakni 62,67 persen dari total jumlah siswa SD dan SMP sebesar 33.782.900 siswa. Penyebab utamanya adalah faktor ekonomi orang tuanya. Meskipun pemerintah memberikan beasiswa, memilih 9,6 juta dari 33,78 juta orang bukan pekerjaan gampang, apalagi warga miskin berjumlah 21,16 juta. Memberi beasiswa hanya kepada sebagian kecil warga miskin akan sia-sia saja. Yang lebih baik adalah penerapan sekolah gratis kepada seluruh siswa wajib belajar (SD-SMP-SMA).

Data sensus tahun 2003 menampilkan gambaran bahwa penduduk berusia 10 tahun ke atas terdiri atas 8,5 % tak masuk SD, 23,0 % drop out SD, dan 33,0 % hanya tamat SD, atau penduduk berpendidikan SD ke bawah 64,5 %, yang bisa menamatkan SMP dan dilanjutkan ke SMA hanya 16,8 %. Dari 42 juta usia belajar, wajib wajib belajar hanya mencapai 32,9

%, atau gagal 64,5 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa 62 tahun Indonesia merdeka, Rakyat Indonesia yang tidak dapat menikmati pendidikan lebih banyak daripada yang berpendidikan (Hartono, 2007).

Dapat disimpulkan bahwa masalah utama pendidikan saat ini adalah (1) biaya Pendidikan yang semakin mahal, (2) infrastruktur/fasilitas pendidikan yang sangat minim, (3) kurikulum, sistem pendidikan dan pelembagaannya, (4) kesejahteraan guru yang sangat minim, gaji guru belum memenuhi standar hidup layak keluarganya (kebutuhan ekonomi keluarga), sehingga tidak jarang guru-guru terlibat kerja sampingan (buka usaha, jadi tukang ojek, dan lain-lain), dan ini sangat mengganggu konsentrasinya untuk mengajar (Hartono, 2007).

Data dari Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara menyebutkan, saat ini sekitar 17.000 anak lulusan SD tidak bisa melanjutkan pendidikan ke SMP. Selain karena faktor ekonomi, penyebab lainnya adalah karena mereka berdiam di daerah terpencil (Nara, 2006).

Dengan mencermati kedua faktor tersebut, sampai saat ini nampaknya belum ada kebijakan yang tepat dan benar-benar serius diwujudkan untuk mengatasi masalah anak putus sekolah di Sulawesi Tenggara.

Suku Bajo yang mendiami wilayah terpencil dengan lokasi pemukiman yang terdistribusi di beberapa pulau kecil menjadi masalah tersendiri dalam usaha mengembalikan anak putus sekolah agar dapat kembali bersekolah. Suku Bajo yang mendiami wilayah pesisir barat Kecamatan Tiworo Kabupaten Muna, seperti lazimnya Suku Bajo yang lain di berbagai wilayah Nusantara, mereka pun lekat dengan tradisi menjadikan anak sebagai alat produksi. Itulah salah satu warisan tradisi yang kurang positif bagi perubahan sosial di lingkungan nelayan pada umumnya. Kemiskinan dan

kebodohan terwariskan kepada anak cucu mereka. Sebab, melanjutkan sekolah setamat SD adalah sesuatu yang terlalu “membebani” hidup mereka. Selain karena tidak kuat membiayai pendidikan formal, lokasi sekolah pun tidak mudah dijangkau. Hal ini karena mereka mendiami pulau-pulau yang secara geografis terpisah satu sama lain.

Ada dua informan yang ditemui dalam melakukan survey. Pertama, Suparman, menjelaskan bahwa hampir semua anak usia SD maupun usia SMP dari anak-anak nelayan Suku Bajo di wilayah pesisir Kecamatan Tiworo mengalami putus sekolah. Mereka nampaknya lebih senang membantu orang tuanya di laut daripada melanjutkan pendidikan. Fenomena ini telah berlangsung lama sehingga secara umum tingkat pendidikan Suku Bajo di wilayah ini rata-rata tidak tamat SD. Kedua, H. Abdul Latif, mengungkapkan bahwa penyebab utamanya adalah kesalahan persepsi orang tua terhadap arti penting pendidikan, di samping masalah biaya pendidikan yang tidak terjangkau.

Berangkat dari fenomena tersebut nampaknya menjadi sangat penting untuk menelusuri lebih dalam akar permasalahan yang telah menyebabkan tingginya angka anak putus sekolah pada komunitas Suku Bajo. Dengan mengungkap permasalahan ini diharapkan akan ditemukan strategi yang efektif agar anak putus sekolah dapat kembali bersekolah.

Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah mengoptimalkan peran dan fungsi Komite Sekolah yang selama ini hampir tidak pernah berjalan. Komite Sekolah diharapkan dapat mendiskusikan berbagai masalah dengan orang tua murid dan stakeholder pendidikan lainnya mengenai strategi/model penanganan anak putus sekolah yang tepat.

Penelitian ini dilakukan dalam rangka mendeskripsikan dan menganalisis beragam variabel yang menyebabkan anak pu-

tus sekolah pada komunitas Suku Bajo di Kecamatan Tiworo Kabupaten Muna. Temuan penelitian selanjutnya akan menjadi dasar bagi dirumuskannya model penanganan anak putus sekolah yang tepat dengan memaksimalkan peran pemberdayaan Komite Sekolah. Lembaga yang dibentuk di setiap satuan pendidikan ini diharapkan dapat berperan besar dalam mengkomunikasikan dan mencari jalan keluar dengan melibatkan dewan pendidikan, pemerintah daerah, orang tua murid, maupun stakeholder pendidikan lainnya.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Fenomena anak putus sekolah

Upaya pemerintah untuk menurunkan angka putus sekolah telah dilakukan antara lain melalui program wajib belajar sembilan tahun, orang tua asuh, Jaring Pengaman Sosial pendidikan, Bantuan Operasional Sekolah, dan lain-lain. Namun angka putus sekolah relatif tidak berubah bahkan angka buta huruf di Indonesia mencapai 29,6 % sebagaimana yang dilansir oleh UNICEF dalam sebuah laporannya tahun 2001 (Sifatu, 2006). Tingginya angka putus sekolah secara umum disebabkan oleh masalah ekonomi (Dewo; Farhan, 2005) di samping masalah persepsi orang tua tentang pendidikan yang keliru (Sifatu, 2004; Asnawati, 2005) serta masalah infrastruktur pendidikan yang terbatas (Jumri, 2007). Dalam hal pembiayaan pendidikan, meski sekolah sudah menggratiskan, tapi masih tetap memberatkan karena adanya biaya baju seragam atau transportasi. Ini terjadi di hampir seluruh daerah di Indonesia seperti di Di Yogyakarta (www.vanillamist.com, 13 juni 2006), Pekalongan, (Imhal, 2007), Polewali Mandar, Banjarbaru (Jumri, 2007).

Menurut Hamundu (Sifatu: 2006), salah satu daerah yang masih terbelakang kuantitas dan kualitas pendidikannya adalah Sulawesi Tenggara. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya pelayanan pemerintah dan rendahnya animo masyarakat terhadap

pendidikan. Penelitian Asnawati (2005) tentang pandangan masyarakat terhadap pendidikan formal di kelurahan Tobimeita Kecamatan Abeli Kota Kendari menemukan bahwa orang tua memiliki pandangan tentang pendidikan formal terlalu lama dan menghabiskan uang. Jumlah anak putus sekolah saat ini sebesar 384 jiwa. Aktivitas anak-anak tersebut mejadi pekerja sektor informal di Kota Kendari seperti buruh bangunan, tikang pikul di pasar penyapu mobil angkutan kota di jalanan, tukang parkir liar dan sebagainya.

Hasil penelitian Sifatu (2004) tentang peran ibu rumah tangga terhadap pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga pada ibu-ibu pejaia sayur keliling di Kelurahan Wawombalata kecamatan Mandonga Kota Kendari menyimpulkan bahwa pendidikan formal anak dalam keluarga tidak diperhatikan karena mengharuskan anak membantunya mencari nafkah. Penelitian Sarimu (Sifatu, 2006) tentang kehidupan pengamen di Kota Kendari mengungkapkan bahwa anak-anak yang tergabung dalam organisasi pengamen adalah kebanyakan anak yang putus sekolah.

2. Kemiskinan dan anak putus sekolah

Kemiskinan dan putus sekolah dapat dianggap sebagai dua sisi dari satu mata uang. Kemiskinan yang mendera sebagian besar keluarga kurang mampu menyebabkan mereka tidak dapat menyekolahkan anak-anaknya secara optimal. Akses untuk memperoleh kesempatan pendidikan menjadi begitu terhambat. Kemiskinan merupakan hambatan terbesar bagi anak-anak dalam mengenyam pendidikan di sekolah (Rijanto, 2005).

Meski sudah ada kemudahan bagi anak-anak dari keluarga yang tidak mampu untuk tidak membayar SPP misalnya, biaya sekolah bukan saja menyangkut hal tersebut. Masih ada biaya yang dikeluarkan orang tua untuk keperluan lain seperti membeli seragam sekolah, buku pelajaran, atau biaya

transportasi anak ke sekolah. Belum lagi biaya lain yang kadang membuat anak dari kalangan tidak mampu menjadi tersisihkan dari interaksi sosialnya. Dampaknya, anak-anak dari keluarga kurang mampu sering kali malas datang ke sekolah dan akhirnya putus sekolah menjadi tak terelakkan (Rijanto, 2005).

Data Departemen Pendidikan Nasional, angka putus sekolah untuk setiap jenjang pendidikan cenderung mengalami penurunan. Khusus untuk jenjang pendidikan SD/MI, pada tahun 2003/2004 angka putus sekolah turun menjadi 702.066 siswa. Sementara itu, untuk pendidikan di SMP/MTs turun menjadi 271.948 pada tahun yang sama (Rijanto, 2005). Oleh karena itu, pemerintah pusat maupun daerah bertanggung jawab agar mengupayakan siswa (terutama pada jenjang pendidikan dasar) yang mengalami putus sekolah tersebut bisa bersekolah.

Untuk menjamin akses yang mudah dalam pelayanan pendidikan tersebut, maka dilakukanlah semacam program kembali ke sekolah oleh pemerintah daerah, di antaranya melalui upaya fungsionalisasi sekolah dan pembebasan SPP. Sebagian dana APBD disisihkan untuk keperluan membangun atau merehabilitasi sekolah yang mengalami kerusakan. Bahkan, beberapa pemerintah daerah melakukan program bebas SPP bagi seluruh anak usia sekolah mulai dari pendidikan dasar hingga menengah. Pertanyaannya, apakah geliat dan semangat tersebut menjadi pertanda bahwa pemerintah daerah memiliki kepedulian dalam memberikan pelayanan pendidikan, terutama bagi keluarga yang kurang mampu. Toh, selama ini tetap saja tersisa angka putus sekolah dan tidak melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya (Rijanto, 2005).

3. Peran Komite Sekolah (KS)

Pemerintah telah membuat keputusan yakni Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite

te Sekolah. Dibentuknya Komite Sekolah dimaksudkan agar adanya suatu organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah. Komite Sekolah yang dibentuk dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologis, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai potensi masyarakat setempat. Adapun tujuan dibentuknya Komite Sekolah sebagai suatu organisasi masyarakat sekolah adalah sebagai berikut (Sidi, 2007).

1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.
2. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
3. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Komite Sekolah mempunyai peran sebagai berikut (Suryadi, 2003).

- a. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
- b. Pendukung (supporting agency) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- c. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
- d. Mediator (Mediator Agency) antara pemerintah dengan masyarakat di satuan pendidikan. Sebagai fungsi mediator, orangtua harus datang ke sekolah kare-

na diundang dengan menggunakan surat undangan resmi.

Untuk menjalankan perannya, Komite Sekolah memiliki fungsi sebagai berikut.

- a. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- b. Melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu (Kurniawan, 2006)
- c. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
- d. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai (1) kebijakan dan program pendidikan; (2) rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS); (3) kriteria kinerja satuan pendidikan; (4) kriteria tenaga kependidikan; (5) kriteria fasilitas pendidikan; (6) hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
- d. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
- e. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- f. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Dalam pengelolaan sumber daya pendidikan, Komite Sekolah dapat mengidentifikasi kondisi sumber daya di sekolah, mengidentifikasi sumber daya masyarakat, memobilisasi bantuan masyarakat untuk

pendidikan di sekolah dan mengkoordinasikan bantuan masyarakat.

4. Pemberdayaan Komite Sekolah

Untuk dapat memberdayakan dan meningkatkan peran masyarakat, sekolah harus dapat membina kerjasama dengan orangtua dan masyarakat, menciptakan suasana kondusif dan menyenangkan bagi peserta didik dan warga sekolah. Itulah sebabnya maka paradigma MBS mengandung makna sebagai manajemen partisipatif yang melibatkan peran serta masyarakat, sehingga semua kebijakan dan keputusan yang diambil adalah kebijakan dan keputusan bersama, untuk mencapai keberhasilan bersama. Dengan demikian, prinsip kemandirian dalam MBS adalah kemandirian dalam nuanza kebersamaan, dan hal ini merupakan aplikasi dari prinsip-prinsip yang disebut sebagai *total quality management*, melalui suatu mekanisme yang dikenal dengan konsepsi *total football* dengan menekankan pada mobilisasi kekuatan secara sinergis yang mengarah pada satu tujuan, yaitu peningkatan mutu dan kesesuaian pendidikan dengan pengembangan masyarakat. Ini dapat dilakukan dalam beberapa hal, Pertama; Penyusunan Rencana dan Program. Sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan, sekolah bertanggungjawab dalam menentukan kebijakan sekolah dalam melaksanakan kebijakan pendidikan sesuai dengan arah kebijakan pendidikan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Kedua, Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Dalam fungsinya sebagai pelaksana pendidikan yang otonom, sekolah berperan dalam menyusun RAPBS setiap akhir tahun ajaran untuk digunakan dalam tahun ajaran berikutnya. Program-program yang telah dirumuskan untuk satu semester atau satu tahun ajaran berikutnya perlu dituangkan ke dalam kegiatan-kegiatan serta anggarannya masing-masing sesuai dengan pos-pos pengeluaran pendidikan di tingkat sekolah. Dari sisi pendapatan, seluruh jenis dan sumber pendapa-

tan yang diperoleh sekolah setiap tahun harus dituangkan dalam RAPBS, baik yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kecamatan, maupun sumber-sumber lain yang diperoleh secara langsung oleh sekolah-sekolah. Dengan demikian, setiap rupiah yang diperoleh sekolah dari sumber-sumber tersebut harus sepenuhnya diperhitungkan sebagai pendapatan resmi sekolah dan diketahui bersama baik oleh pihak sekolah (kepala sekolah, guru-guru, pegawai, serta para siswa) maupun oleh Komite Sekolah sebagai wakil stakeholder pendidikan. Ketiga, pelaksanaan program pendidikan. Dalam hal ini melalui paradigma MBS sekolah diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengurus dan mengatur pelaksanaan pendidikan pada masing-masing sekolah. Pelaksanaan pendidikan di sekolah dalam tempat yang berlainan dimungkinkan untuk menggunakan sistem dan pendekatan pembelajaran yang berlainan. Dalam keadaan seperti itu, maka Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah akan dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai penunjang dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang sejalan dengan kondisi dan permasalahan lingkungan masing-masing sekolah. Komite sekolah dapat melaksanakan fungsinya sebagai partner dari kepala sekolah dalam mengadakan sumber-sumberdaya pendidikan dalam rangka melaksanakan pengelolaan pendidikan yang dapat memberikan fasilitas bagi guru-guru dan murid untuk belajar sebanyak mungkin, sehingga pembelajaran menjadi semakin efektif. Keempat, akuntabilitas pendidikan. Dalam era demokrasi dan partisipasi, akuntabilitas pendidikan tidak hanya terletak pada pemerintah, tetapi bahkan harus lebih banyak pada masyarakat sebagai *stakeholder* pendidikan.

Penelitian ini berbasis pada pendekatan kualitatif. Seperti ungkapan Bogdan dan Taylor (1992) pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan,

dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau suatu organisasi tertentu dalam suatu konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat dirumuskan model penanganan anak putus sekolah pada komunitas masyarakat Bajo di wilayah pesisir Kecamatan Tiworo Kabupaten Muna dengan mengoptimalkan peran Komite Sekolah.

Fokus penelitian diarahkan pada upaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis (1) jumlah anak putus sekolah serta faktor-faktor penyebabnya; (2) persepsi orang tua dan anak putus sekolah terhadap arti penting pendidikan; (3) usaha-usaha yang dilaksanakan oleh Komite Sekolah, Diknas Kabupaten dan stakeholder lainnya dalam mengatasi problem anak putus sekolah di Kec. Tiworo Kabupaten Muna.

Mengingat tidak ada data yang pasti berapa jumlah anak putus sekolah pada Komunitas Suku Bajo di wilayah pesisir Kecamatan Tiworo Kab. Muna, maka untuk memperoleh data yang valid atas jumlah anak putus sekolah tersebut, dilakukan pengumpulan data secara *snow ball* yakni dengan jalan menetapkan informan kunci lebih dahulu yakni kepala desa dan tokoh masyarakat setempat. Dari informan kunci tersebut kemudian dilakukan pelacakan anak putus sekolah dilokasi penelitian.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam (*indepth interview*); dokumentasi (*documentation*); dan observasi (*observation*). Untuk menjamin validitas data yang diperoleh dari para responden, dilakukan teknik *triangulasi sumber* dari para informan sampai pada titik jenuh yaitu suatu keadaan dimana data yang diperoleh relatif sama.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Realitas Anak Putus Sekolah

Secara kuantitatif, jumlah anak putus sekolah secara pasti di lokasi penelitian sulit dilakukan karena penelitian ini tidak melakukan survai secara keseluruhan dan tidak bermaksud untuk melakukan sensus terhadap jumlah anak putus sekolah. Namun, secara kualitatif, gambaran tentang anak putus sekolah dapat dikatakan sangat tinggi.

Keterangan kepala desa di Pulau Balu menjelaskan bahwa mereka yang tamat SD dan SMP di pulau tersebut paling tinggi 4% dari keseluruhan anak usia sekolah. Bahkan di Pulau Tassipi lebih tinggi lagi. Dapat dikatakan rata-rata anak di Pulau ini tidak tamat SD, apalagi SMP.

2. Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah

Secara teoritik, faktor penyebab anak putus sekolah dapat dikembalikan pada dua faktor utama yakni faktor internal meliputi kemampuan, minat, motivasi, nilai-nilai dan sikap, ekspektasi (harapan), serta persepsi siswa tentang sekolah dan faktor eksternal yang meliputi latar belakang ekonomi orang tua, persepsi orang tua tentang pendidikan, jarak sekolah dari rumah, hubungan guru-murid, usaha yang dilakukan pemerintah (meliputi pemberian bantuan dan pengadaan sarana dan prasarana).

a) Kemampuan anak dalam belajar

Dilihat dari faktor kemampuan anak dalam belajar, umumnya mereka tidak mengalami masalah. Bahkan prestasi mereka rata-rata baik. Ini menunjukkan bahwa faktor internal anak yang menyebabkan anak putus sekolah tidak dipengaruhi oleh faktor ini. Dengan kata lain, bahwa anak-anak putus sekolah yang ada mempunyai kemampuan akademik yang baik. Hal tersebut dibuktikan oleh fakta bahwa ketika siswa dari salah satu desa di Kecamatan Tiworo bersekolah di tempat lain, mereka selalu unggul dibanding dengan siswa lain

yang bertempat tinggal dekat dengan fasilitas belajar. Namun demikian, kondisi tersebut tidak cukup membantu anak-anak Bajo ini untuk tetap memilih bersekolah, karena mereka justru lebih senang membantu orang tuanya sebagai nelayan tradisional.

b) Minat dan motivasi anak untuk sekolah

Minat dan motivasi anak untuk sekolah di lokasi penelitian menunjukkan kecenderungan yang berbeda. Ada yang memiliki minat dan motivasi yang baik dan ada pula yang kurang. Rata-rata anak yang putus sekolah memiliki minat yang besar untuk bersekolah. Namun demikian, kondisi lingkungan dimana mereka tinggal memberikan pengaruh yang buruk bagi pengambilan keputusan anak-anak tersebut untuk kembali bersekolah atau tidak.

Meskipun demikian, lingkungan juga tidak selamanya memberi pengaruh negatif. Dalam beberapa kasus ditemukan bahwa faktor kesuksesan orang-orang Bajo yang berhasil dalam pendidikannya mampu memberikan motivasi bagi orang tua untuk memacu semangat anak-anak mereka untuk bersekolah.

Kondisi di atas nampaknya berbeda jauh dengan minat dan motivasi anak-anak yang berdomisili di Desa Tasipi. Secara umum, minat, dan motivasi anak-anak untuk sekolah relatif kurang. Kondisi tersebut menyebabkan anak-anak di daerah ini tidak memiliki semangat yang besar kembali ke bangku pendidikan.

c) Persepsi anak tentang sekolah

Persepsi anak terhadap sekolah positif atau negatif akan memberikan dampak pada minat mereka untuk sekolah. Salah satu persepsi positif dari anak Bajo di lokasi penelitian adalah keinginan bersekolah karena penting untuk memperoleh ilmu untuk bisa meraih kesuksesan. Persepsi tersebut sangat positif yang dapat mengantarkan anak-anak Bajo kembali ke sekolah. Namun, persepsi tentang pentingnya sekolah ju-

ga terkadang tidak dapat mengubah keinginan anak-anak Bajo yang besar untuk sekolah.

Selain persepsi positif, hasil penelusuran di lapangan juga menunjukkan adanya persepsi negatif dari anak-anak Bajo, seperti adanya pandangan bahwa dengan sekolah mereka tidak bisa memperoleh uang.

Persepsi negatif tentang sekolah yang diperkuat pula oleh dua pandangan di atas, akan memberikan dampak negatif yang sangat besar terhadap minat mereka untuk kembali ke sekolah. Sikap pesimistik dari anak-anak dan orang tua mereka yang demikian, juga berkaitan erat dengan kondisi kemampuan ekonomi keluarga yang relatif sangat terbatas. Sehingga menyebabkan semua anggota keluarga harus terlibat secara aktif mencari penghasilan untuk menyokong kehidupan keluarga.

d) Harapan Anak

Harapan anak untuk kembali bersekolah umumnya tinggi. Bahkan siswa yang putus sekolah tersebut masih memiliki harapan untuk bersekolah kembali. Fakta ini ditemukan ketika guru menyambangi rumah anak-anak yang putus sekolah tersebut. Tujuannya untuk menelusuri masalah yang mereka temui. Guru selanjutnya memberikan masukan yang memadai kepada orang tua agar anak-anak mereka mau kembali ke sekolah. Hal spesifik misalnya mencarikan pakaian bekas untuk dibagikan kepada anak-anak putus sekolah juga pernah ditempuh oleh kalangan guru.

Uraian di atas, memberikan gambaran bahwa anak-anak putus sekolah umumnya dapat dikembalikan ke sekolah jika permasalahan mereka dapat diselesaikan.

e) Aspirasi/Cita-cita anak

Anak-anak putus sekolah masih memiliki harapan untuk masa depan yang lebih baik. Penelusuran penelitian ini menemukan bahwa setiap siswa di desa ini memiliki cita-cita, seperti: ingin jadi polisi,

kuliah di Kendari, jadi pengusaha, dan masih banyak lagi. Namun demikian, cita-cita tersebut hanya harapan belaka karena kembali bersekolah.

f) Pekerjaan dan penghasilan orang tua

Sebagai komunitas nelayan, Suku Bajo umumnya berada dibawah garis kemiskinan. Penghasilan mereka hanya cukup untuk membiayai kebutuhan sehari-hari dengan kualitas gizi yang tidak memadai. Wajar jika faktor ini menjadi penyebab banyaknya anak putus sekolah di wilayah ini. Karena alasan ekonomi pula, banyak anak-anak di Kecamatan Tiworo terpaksa meninggalkan sekolah untuk membantu orang tua mencari ikan dan menjualnya.

g) Persepsi Orang Tua tentang Kemampuan & Kemauan Anak

Pada dasarnya orang tua meyakini dengan baik, jika anak-anak mereka mampu dan mau untuk kembali bersekolah. Namun demikian, lingkungan pergaulan teman sebaya yang sudah meninggalkan bangku sekolah lebih awal ternyata memberikan dampak yang tidak dapat dianggap enteng. Karena pergaulan teman sebaya mempunyai kemampuan saling mempengaruhi satu sama lain. Sehingga membuat anak-anak Bajo semakin mantap untuk meninggalkan bangku sekolah (putus sekolah).

h) Persepsi Orang tua tentang sekolah

Persepsi orang tua tentang arti penting pendidikan di wilayah penelitian ini bervariasi. Ada orang tua yang memandang bahwa pendidikan itu sangat penting sehingga mereka berusaha mendorong anak-anaknya untuk bersekolah. Namun, umumnya para orang tua di wilayah ini kurang memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Karena hal terpenting adalah anak-anak dapat membantu mereka memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga yakni dengan membantu orang tua mereka menjadi nelayan.

Kondisi demikian merupakan tantangan terbesar bagi guru dimana orang tua

malah lebih memilih anak-anak mereka menjadi pelaut daripada harus kembali menuntut ilmu di sekolah.

3. Faktor Eksternal yang Menyebabkan siswa putus sekolah (menurut siswa)

Anak-Anak Bajo yang putus sekolah juga memiliki pandangan sendiri terhadap berbagai hal di luar diri mereka yang dianggap menjadi penyebab meninggalkan sekolah. Berkaitan dengan hal tersebut, ada tiga hal utama yang menjadi penyebabnya, yakni (1) orang tua tidak mampu membiayai sekolah mereka; (2) jarak sekolah yang terlalu jauh; (3) tidak ingin terpisah jauh dari orang tua. Mayoritas penduduk di lokasi penelitian di merupakan nelayan tradisional dengan penghasilan yang umumnya hanya cukup untuk kehidupan sehari-hari. Kondisi ini menjadi penyebab utama sebagian orang Bajo di Tiworo tidak mampu menyediakan biaya untuk studi lanjut anak-anaknya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisis bahwa faktor internal yang menyebabkan anak putus sekolah pada komunitas Suku Bajo Kecamatan Tiworo umumnya adalah rendahnya minat dan motivasi anak untuk sekolah disamping adanya persepsi yang keliru tentang arti pendidikan. Meskipun sebenarnya anak-anak yang putus sekolah memiliki kemampuan yang rata-rata bagus dan masih memiliki sejumlah harapan dan cita-cita untuk sukses dengan melanjutkan pendidikan, namun hal ini menjadi tidak bermanfaat ketika minat mereka untuk sekolah rendah dan persepsi mereka keliru tentang arti pendidikan. Bagi kebanyakan anak putus sekolah termasuk para orang tua di Kecamatan Tiworo berpendapat bahwa sekolah hanyalah cara untuk mendapatkan uang, sehingga bila sudah mendapatkan uang atau bisa bekerja membantu orang tua dengan menjadi nelayan ini dianggap sudah cukup bagi mereka. Pada titik ini, menurut mereka sekolah menjadi tidak begitu penting.

Komunitas suku Bajo umumnya bekerja sebagai nelayan tradisional, tidak ada alternatif mata pencaharian lainnya, kecuali beberapa keluarga yang mendiami Pulau Balu. Mereka yang berdiam di Pulau Balu di samping sebagai nelayan mereka juga bekerja sebagai pedagang. Sehingga penghasilan mereka dibanding dengan orang-orang Bajo lainnya relatif lebih sejahtera. Meski demikian, persepsi mereka yang keliru tentang arti penting pendidikan bagi anak-anaknya telah berakibat pada banyaknya anak putus sekolah. Bagi kebanyakan orang Bajo, pendidikan tidak lebih dari sekedar sarana mendapatkan kehidupan yang lebih baik dimasa depan, sehingga jika kondisi kehidupan yang mereka harapkan sudah didapatkan maka sekolah menjadi tidak begitu penting. Hal tersebut berlaku bagi mereka yang berkecukupan secara ekonomi. Sementara mereka yang berada di bawah garis kemiskinan meskipun setiap hari mereka menghabiskan waktunya di laut, namun penghasilan mereka hanya cukup untuk memenuhi makan dengan standar gizi yang tidak memadai. Kondisi ini telah memaksa para orang tua yang memiliki keinginan untuk menyekolahkan anak-anaknya menjadi tidak tercapai karena tidak mampu membayar biaya transportasi kesekolah untuk anak-anaknya maupun biaya-biaya lainnya yang diperlukan.

Akumulasi dari faktor ekonomi (kemiskinan), persepsi yang keliru tentang pendidikan bagi kebanyakan orang tua dan anak-anak mereka telah mengakibatkan lahirnya pandangan tentang “semakin tidak perlunya pendidikan bagi anak-anak”. Pandangan semacam ini lalu mempengaruhi anak-anak lain yang masih memiliki minat untuk bersekolah menjadi tidak bersekolah. Artinya, faktor lingkungan pergaulan menjadi salah satu faktor yang telah menyebabkan banyaknya anak putus sekolah pada komunitas suku Bajo di Kecamatan Tiworo.

4. Upaya yang Dilakukan Pemerintah dan Masyarakat

Untuk mengatasi tingginya angka putus sekolah di Kecamatan Tiworo, pemerintah setempat telah melakukan upaya penanganan, yakni dengan membangun infrastruktur gedung sekolah Sekolah Menengah Pertama (SMP), tepatnya di Desa Tondasi. Gedung Sekolah tersebut dibangun atas bantuan Pemerintah Belanda. Beberapa tahun yang lalu, di wilayah ini juga telah dibangun SMK Kelautan dan telah menerima siswa baru untuk beberapa angkatan.

Namun sayangnya, keberadaan fasilitas gedung sekolah tersebut tidak didukung dengan ketersediaan guru yang memadai. Di wilayah pesisir ini hanya ada 1 orang guru PNS dan 2 orang guru honorer. Hal ini menjadi tantangan tersendiri sekaligus hambatan bagi penanganan anak-anak putus sekolah yang terus bertambah dari tahun ke tahun.

Selain upaya membangun infrastruktur sekolah, pemerintah daerah juga telah membuka SMP Terbuka yang diharapkan menjadi salah satu jalan keluar untuk mengatasi semakin besarnya angka anak putus sekolah di wilayah ini.

5. Peran Komite Sekolah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komite Sekolah justru tidak berfungsi sama sekali, khususnya dalam upaya membantu penanganan anak-anak putus sekolah. Komite Sekolah hanya diperlukan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan administratif ketika pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

D. PENUTUP

Ada beberapa hal yang menjadi simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, yakni sebagai berikut. Pertama, banyaknya anak putus sekolah pada Komunitas Suku Bajo yang mendiami wilayah Kecamatan Tiworo Kabupaten Muna

disebabkan oleh dua faktor utama yakni faktor internal dan faktor eksternal yang saling menguatkan satu sama lain

Kedua, faktor internal yang menjadi penyebab utama banyaknya anak putus sekolah berhubungan dengan rendahnya minat dan motivasi anak untuk sekolah di samping adanya persepsi yang keliru tentang arti pendidikan.

Ketiga, faktor eksternal yang menyebabkan anak putus sekolah pada komunitas suku Bajo Kecamatan Tiworo berhubungan erat dengan masalah pekerjaan orang tua. Persepsi orang tua tentang arti penting pendidikan yang keliru, faktor ekonomi serta faktor lingkungan pergaulan anak-anak setempat. Akumulasi dari faktor ekonomi (kemiskinan), persepsi yang keliru tentang pendidikan bagi kebanyakan orang tua dan anak-anak mereka telah mengakibatkan lahirnya pandangan tentang “semakin tidak perlunya pendidikan bagi anak-anak”.

Keempat, usaha-usaha yang dilakukan untuk menangani anak putus sekolah sejauh ini belum dilaksanakan secara serius dan terkoordinasi. Usaha yang dilakukan hanya sebatas apa yang dilakukan oleh orang tua dengan mendorong anaknya untuk kembali bersekolah. Pemerintah melihat fenomena anak putus sekolah di wilayah ini hanya sebatas problem terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang tidak memadai sehingga solusinya antara lain dilakukan dengan membangun gedung SMP (sekarang dalam proses penyelesaian), sementara faktor persepsi yang keliru dari para orang tua dan anak putus sekolah sebagai penyebab banyaknya anak putus sekolah nampaknya luput dari perhatian pemerintah.

Dari beberapa simpulan di atas, ada beberapa hal yang dapat direkomendasikan, yakni: pertama, untuk mengatasi problem anak putus sekolah pada komunitas Suku Bajo Kecamatan Tiworo harus dilakukan secara serius dengan melibatkan segenap

stakeholder pendidikan, mengingat kompleksitas penyebab banyaknya anak putus sekolah di wilayah ini.

Kedua, usaha mengatasi masalah anak putus sekolah pada komunitas Suku Bajo Di Kecamatan Tiworo perlu dilakukan pendekatan yang efektif dalam mengubah persepsi para orang tua maupun anak-anak putus sekolah tentang arti pentingnya pendidikan dimasa depan. Untuk maksud ini, dalam pelaksanaannya perlu melibatkan pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat setempat.

Ketiga, program dalam jangka panjang pemerintah daerah, perlu mengusahakan pembangunan gedung SD di setiap pulau yang belum terdapat SD di pulau yang bersangkutan, khususnya di Pulau Balu dan Pulau Katela, mengingat anak-anak di pulau ini terkendala dengan biaya transportasi yang tidak terjangkau bila harus bersekolah dengan menyebrang ke wilayah daratan (Tondasi). Sementara dalam jangka pendek Dinas Diknas Kabupaten Muna harus mewajibkan pelaksanaan program Paket A dan Paket B untuk membantu anak-anak putus sekolah melanjutkan pendidikannya.

Keempat, bahwa untuk membantu anak putus sekolah kembali ke sekolah yang terhambat faktor ekonomi perlu dioptimalkan pemanfaatan dana BOS.

Kelima, perlu dilakukan penelitian secara mendalam tentang keberadaan Komite Sekolah yang tidak berperan sama sekali dalam usaha untuk mengatasi masalah anak putus sekolah di wilayah ini.

DAFTAR PUSTAKA

Asnawati, 2005, *Pandangan Orang Tua Terhadap Pendidikan Formal Anak Studi Di Kelurahan Tobimeita Kecamatan Abeli Kota Kendari*, belum dipublikasikan

Bogdan, Robert C & Steven J. Taylor. 1992. *Introduction to Qualitative*

research methods: A Phenomenological approach in the social sciences, Alih bahasa Arief Furchan, Jhon Wiley and Sons. Surabaya: Usaha Nasional.

Budimansyah, Dasim, *Indikator Kinerja Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*, Tim Pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Ditjen Dikdasmen Depdiknas.

Dewo, Emanuel Setio, 2003, *Pantas saja banyak anak putus sekolah* (www.Vanillamist.com. 13 juni 2006)

Farhan, Matappa, 2005, *Ribuan Siswa Putus Sekolah di Polewali Mandar* (<http://www.media-indonesia.com>)

Hartono, Rudi, 2007, *Rakyat Miskin Dilarang Cerdas*, ([http://www. Rumahkiri.com](http://www.Rumahkiri.com), 31 Agustus 2007)

Jumri, 2007, *Ratusan Anak Pendulang Intan Putus Sekolah* (Gatra. Com, 31 Agustus 2007).

Kurniawan, Iwan, 2006, *Optimalisasi Komite Sekolah*, Pikiran Rakyat On Line, Jumat 27 Januari 2006

Milles, Matthew B. & A. Michel Huberman. 1992. *An Expanded Source Book: Qualitative Data Analysis*, Sage Publication, London.

Nara, Nasrullah, 2006, *Pendidikan Di Pesisir Menuntut Ilmu Di Atas laut*, (<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0612/13/humaniora/3169115.htm>)

Rijanto, Dwi Puji, 2005, *Kemiskinan dan Putus Sekolah*, Kompas, Senin, 04 April 2005

Sidi, Indra Djati, *Panduan Umum Dewan Pendidikan Dan Komite Sekolah*, (www.geocities.com-pakguruonline 1. htm, Jumat 12 Oktober 2007)

Sifatu, 2006, *Menurunkan Angka Putus Sekolah Melalui Modal Sosial Studi*

Di Kelurahan Tobimeita Kecamatan Abeli Kota Kendari, belum dipublikasikan.

- Suryadi, Ace, 2003, *Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah; Mewujudkan Sekolah Sekolah Yang Mandiri dan Otonom*, Makalah Disampaikan pada Sosialisasi Pemberdayaan Dewan Pendidikan Dan Komite Sekolah selama Juni 2003
- Yuga, Handaya Wira, 2007, *Jutaan Anak Putus Sekolah: Cermin Pendidikan 62 tahun Merdeka*, Waspada Online, Rabu 15 Agustus 2007